

**TERBENTUKNYA KABUPATEN GAYO LUES  
1997-2002**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)*



**OLEH :**

**JAMIATI  
2007/84538**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues 1997-2002  
**Nama** : Jamiati  
**NIM/Bp** : 84538/2007  
**Jurusan** : Sejarah  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, Agustus 2012**

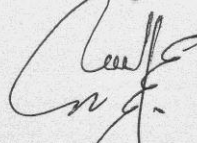
**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



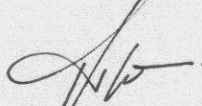
**Drs. Etmi Hardi, M.Hum**  
**NIP. 196203041993031003**

**Pembimbing II**



**Abdul Salam, S.Ag, M.Hum**  
**NIP. 197207212008121001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan**



**Hendra Naldi, SS. M.Hum**  
**NIP. 196909301996031001**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Tanggal 17 Juli 2012*

**TERBENTUKNYA KABUPATEN GAYO LUES 1997-2002**

Nama : Jamiati  
Nim/ Bp : 84538/2007  
Jurusan : Sejarah  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2012

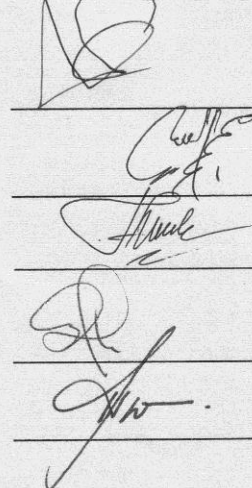
**Tim Penguji**

1. Ketua : Drs Etmi Hardi, M.Hum
2. Sekretaris : Abdul Salam, S.Ag, M.Hum
3. Anggota : Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum

Drs. Zul Asri' M.Hum

Hendra Naldi, SS, M.Hum

**Tanda Tangan**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAMIATI  
NIM/BP : 84538/2007  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya dan pemikiran saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

**Diketahui oleh**

**Ketua Jurusan Sejarah**



**Hendra Naldi, S.S, M.Hum**  
**NIP. 196909301996031001**

**Padang, Agustus 2012**

**Pembuat Pernyataan**



**JAMIATI**  
**NIM. 84538**

## **ABSTRAK**

**Jamiati (2007/ 84538): Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues 1997-2002 (Skripsi) Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Social (FIS) Universitas Negeri Padang (Unp)**

Skripsi ini mengkaji tentang proses terbentuknya kabupaten Gayo Lues, yang melihat proses pemekaran tidak dari konteks sekarang, tapi dilihat dari perjalanan sejarah daerah ini dari masa kerajaan Aceh sampai pada era Reformasi. Dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan yang akan diteliti lebih ditekankan kepada langkah-langkah proses yang ditempuh pemerintah dan oleh segenap elemen masyarakat untuk menjadikan gayo Lues menjadi kabupaten. Untuk memperjelas pokok persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana proses pemekaran Aceh Tenggara hingga melahirkan kabupaten kabupaten Gayo Lues

Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan proses pemekaran Aceh Tenggara hingga melahirkan kabupaten Gayo Lues dan mendeskripsikan perjuangan masyarakat Gayo Lues dalam proses pembentukan Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini termasuk penelitian sejarah, dengan mengumpulkan data berupa arsip atau dokumen kemudian wawancara yang dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat Gayo Lues yang terlibat dalam proses terbentuknya kabupaten Gayo Lues kemudian buku yang menunjang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data yang terkumpul dikritik untuk mengetahui keaslian informasi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan objek yang diteliti, kemudian hasil penelitian tersebut dikelompokkan berdasarkan objek ditelitian tersebut dituangkan dalam bentuk karya tulis.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proses terbentuknya kabupaten Gayo Lues mengalami proses yang panjang. Ide pemekaran telah ada semenjak lama namun pada tahun 1997 mulai masyarakat Gayo Lues menggerakan pembentukan kabupaten Gayo Lues, pada proses pembentukan kabupaten Gayo Lues mengalami beberapa kendala, dengan lahirnya Reformasi dimanfaatkan dalam mempercepat proses terbentuknya kabupaten Gayo Lues. Pembentukan kabupaten Gayo Lues di gagas oleh para masyarakat Gayo Lues, dalam usaha pembentukan kabupaten banyak mengalami kendala. Usaha ini baru berhasil tahun 2002. Hal lain yang perlu dicermati adalah setelah pemekaran, kabupaten Gayo Lues banyak mengalami perubahan yang lebih baik

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkah dan karunianya akhirny saya telah telah menyelesaikan skripsi dengan judul” **Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues 1997-2002**” yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar strata satu Universitas Negeri Padang.

Keberhasilan penulis raih tidak terlepas dari do’a rsetu kedua orang tua saya yang telah banyak memeberikan dorongan, nasehat, bimbingan hanya Allah yang mampu membalas semau pengorbanan ayah dan ibu tercinta

Selama penulisan skripsi ini penulis hanya mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan yang sangat berguna dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih:

1. Bapak Hendra Naldi, S.S, M.Hum ketua jurusan sejarah
2. Bapak Drs Etmi Hardi, M.Hum sebagai sekretaris jurusan dan pembimbing satu
3. Bapak Abdul Salam, S.ag. M.Hum sebagai pembimbing dua
4. Bapak dan ibuk tim pengiju yang telah memeberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen staf pengajar jurusan sejarah yang telah mendidik dan melimpahkan ilmunya pada saat penulis mengikuti perkuliahan
6. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada informan yang telah bersedia member data dan informasi kepada penulis

7. Teristimewah kepada orang tua penulis dan beserta keluarga besar yang telah memberikan dukunagn doa, moril dan material yang tidak terhingga kepada penulis
8. Rekan-rekan mahasiswa jurusan sejarah, khususnya angkatan 2007 yang telah banyak memnerikan semangat sehingga penulisan skrips ini dapat diselsaikan dengan baik
9. Semua pihak yang berpartisipasi membantu dan menyumbangkan idenya hingga skipsi ini dapat berjalan dengan lancer

Pada Allah swt, penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, dorongan, dan doa pengorbanan tersebut menjadi amal ibadah disisi-Nya. Penulisan menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih . harapan penilis semoga skripsi ini dapat bermnfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penulis khususnya.

Padang, Juli 2012

penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan dan rumusan Masalah... ..	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II GAYO LUES SEBELUM PEMEKARAN.....</b>	<b>17</b>
A. Kondisi Geografis dan penduduk.....	17
B. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya.....	19
C. Perkembangan Adimistrasi Gayo Lues .....	22
1. Masa kerajaan Aceh.....	22
2. Masa penjajahan Belanda .....	24
3. Masa pendudukan Jepang.....	26



4. Pasca Kemerdekaan.....	27
D. Gayo Lues Sebagian administratif Kabupaten aceh Tenggara.....	28
<b>BAB III PEMBENTUKAN KABUPETEN GAYO LUES.....</b>	<b>35</b>
A. Gerakan Otonomi.....	35
1. Rencana pembentukan kabupaten Gayo Lues.....	35
2. Perjuangan masyarakat gayo Lues dalam pembentukan kabupaten Gayo Lues... ..	39
B. Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues.....	50
C. Perkembangan Gayo Lues Setelah Otonomi.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>halaman</b>
Table 1: Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara.....	32
Table 2: Latak Geografis Aceh Tenggara.....	34
Table 3: Kondisi Gayo Lues Menjelang Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues.....	54
Table 4: Letak Geografi Gayo Lues .....	55
Table 5: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Gayo Lues Akhir Tahun 2003.....	58

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten. Dalam kabupaten yang ada di Indonesia masih banyak yang ingin dimekarkan dengan alasan bahwasanya pemekaran itu perlu agar terwujud dan terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pemekaran banyak diminati oleh masyarakat setempat karena adanya kesenjangan atau adanya keadaan yang tidak merata dalam segala bidang baik itu bidang pembangunan atau sebagainya. Salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang telah dimekarkan pada tahun 2002 adalah kabupaten Gayo Lues.

Semangat otonomi daerah memunculkan wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan layanan publik kepada masyarakat, dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Riwayat pemekaran daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan sejarah yang tidak terpisahkan dari pembentukan Negara kesatuan republik Indonesia otonomi daerah sekarang ini, telah dilakukan beberapakali di daerah Indonesia dengan berbagai bentuknya.<sup>1</sup>

Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

---

<sup>1</sup> Dedid Asrianto. *Sejarah Pemekaran Pasaman*. skripsi

menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumberdaya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat umum, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru marak sejak disahkannya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 39 kota. Salah satu pemekaran kabupaten di Indonesia adalah kabupaten Aceh Tenggara pada 10 April 2002 yaitu kabupaten Gayo Lues.<sup>2</sup>

Gayo Lues adalah salah satu daerah yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan sejarahnya Gayo merupakan suku tertua di Aceh. Hal ini dapat di buktikan melalui fakra yaitu banyak nama-nama tempat di daerah Aceh berasal dari bahasa Gayo seperti Langsa,

---

<sup>2</sup>[http://www.bps.go.id.\\_pemekaran\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://www.bps.go.id._pemekaran_daerah_di_Indonesia)

Beruen(berren), Besitang (besi tatang), Seulawah (selo sawah), Melabuh(mera beluh). Hal ini membuktikan bahwa daerah Aceh pertamakali ditemukan didiami oleh suku Gayo sehingga para pengembara suku Gayo memberi nama tempat yang mereka lalui.<sup>3</sup>

Sebelum pemekaran tahun 1974-2002, Gayo Lues merupakan bagaian dari kabupaten Aceh Tenggara. Letaknya dibagian Utara kabupeten Aceh Tenggara. Secara administratif Gayo Lues mempunyai batasan sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur dan Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Badar dan kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat.<sup>4</sup>

Secara administratif jika dilihat dari aspek historisnya daerah kabupaten Gayo Lues sebelum kemerdekaan, belum merupakan pemerintahan sendiri, bisa dilihat pada masa kerajaan Aceh Gayo Lues masih bergabung dengan Gayo takengon dan Alas, yang merupakan bagian dari wilayah Aceh, dibagi atas beberapa daerah yang disebut kejurun. Gayo Lues, Takengon dan Alas di bagi menjadi delapan kejurun enam daerah di Gayo Lues dan Takengon, dua daerah di Tanah Alas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> IsmanTantawi, M.A. 2011. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gago Lues*: Medan Indonesia. Yayasan pusat kajian budaya Gayo- medan. Hal 9-10

<sup>4</sup> *ibid.* hal 11

<sup>5</sup> . M.H Gayo. *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*. Balai Pustaka: Jakarta. Hal 456

Pada tahun 1905, Gayo Lues dan tanah Alas dibentuk pemerintahan sipil oleh Belanda yang disebut *Onder Afdeling*. *Onder Afdeling* yang berpusat di Gayo Lues. Gayo Lues membawahi tiga daerah yaitu: yang pertama landchep (kecamatan) Gayo Lues berkedudukan di Belangkejeren, yang ke dua *Landschap* (kecamatan) Batu Bulan yang berkedudukan di Pulonas, yang ketiga *Landschap* (kecamatan) Bambu berkedudukan di Babel yang berada di Tanah Alas. Disini bisa dilihat bahwa pada masa penjajahan Belanda Gayo Lues membahahi Tanah Alas. Dari aspek historis nampak diantara kedua wilayah ini tidak ada hubungan. Dilihat jarak kedua wilayah ini telah menunjukkan akar pemisahan.

Setelah kemerdekaan susunan pemerintah di Aceh mulai diperbaiki. Pada tahun 1946, untuk daerah yang terletak ditengah pedalam Aceh yaitu Gayo Takengen, Gayo Lues dan Tanah Alas disatukan dalam satu kabupaten disebut dengan keluhakan, ketiga daerah tersebut dinamakan Keluhakan Aceh Tengah. Kemudian untuk pemilihan Luhak (Bupati) dan ibukota Kabupaten dimusyawarahkan antara pemimpin dari Takengen, Blangkejeren dan Kutacane. Setelah diadakan musyawarah terpilihlah Raja Abdul Wahab sebagai Luhak Aceh Tengah sedangkan Takengen dipilih menjadi ibukota, A.R.Hajat menjadi Patih, Mude Sedang menjadi Wedana Takengen, M. Saleh Aman Sari menjadi Wedana Gayo Lues dan Khabar Ginting menjadi Wedana Tanah Alas.

Setelah terjadi perubahan susunan pemerintahan Gayo Lues dan Tanah Alas berada dibawah pemerintahan Aceh Tengah, Gayo Leus dan Tanah Alas ditetapkan koordinator kewedanaan. Setelah susunan Pemerintahan terbentuk dan berjalan beberapa bulan mulailah terasa kesulitan menjalankan roda pemerintahan mengingat hubungan Takengon-Blangkejeren-Kotacane sangat jauh. Wilayah kabupaten yang luas mengakibatkan rendahnya tingkat pelayanan publik yang dapat diberikan pemerintahan daerah, tingkat pelayanan publik yang rendah, keadaan masyarakat kurang diperhatikan dan terabaikan dan pileknya pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat tidak mengalami perubahan dari keadaan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena wedana hanya hanya berfungsi sebagai wakil, pelaksanaan kebijakan keputusan, koordinator dan pengawas. Ia tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Begitu juga dengan Tanah Alas tidak puas dengan sistem pemerintahan yang ada karena tidak bisa mengembangkan wilayah mereka.<sup>6</sup>

Atas dasar kesulitan di atas maka tahun 1957, mulailah Gayo Lues dan Tanah Alas berjuang membentuk Kabupaten sendiri. Setelah melalui perjuangan penuh rintangan akhirnya pada tahun 1974 Gayo Lues dan Alas

---

<sup>6</sup> Wawancara. Bapak Ramli. 09 Juni 2012.

terbentuk menjadi Kabupaten yang dinamakan Kabupaten Aceh Tenggara. Yang berpusat di Tanah Alas dan Gayo Lues ditetap pemabantu bupati <sup>7</sup>

Pada tahun 1969 Gayo Lues juga ingin membentuk pemerintahan sendiri karena status pemabantu bupati tidak membawak perubahan terhadap wilayah Gayo Lues, pembatu bupati dan kewedanaan tidak ada bedanya tetap saja tidak bisa membuat keputusan. Selain tidak adanya perubahan dilihat juga dari kenyataan sejarah menjadi landasan, mengingat latar belakang masa lampu, budaya, aspirasi masyarakat Gayo Lues dan faktor kekayaan alam dengan potensi ekonomi memungkinkan untuk dikembangkan sehingga mampu menunjang kebutuhan pembangunan dan kesiapan masyarakat, sumber manusia yang tersedia.<sup>8</sup>

Dalam kenyataan masa lampau masyarakat Gayo Lues tidak mempunyai kedudukan dalam pemerintahan, yang pertama pembentukan kapupaten Aceh Tengah pada tahun 1946, yang paling keras memperjuangkan ibu kota adalah Gayo Lues pada masa ini Aceh Tengah mendapatkan posisi sebagai kabupaten dan ibu kotanya adalah Takengon. Tanah Alas mendapat patih sedangkan Gayo Lues tidak mendapat apa-apa. Pemekaran Aceh Tengah menjadi Aceh Tenggara pada tahun 1974, pada masa ini jabatan bupati selalu dipegang oleh putra Tanah Alas putra Gayo

---

<sup>7</sup> salim wahab. Sejarah singkatnya kabuoaren gayo lues  
[http://www.pemda.gayo.lues.go.id/sejarah\\_gayo\\_lues](http://www.pemda.gayo.lues.go.id/sejarah_gayo_lues)

<sup>8</sup>.Lampiran Gubernur Kepala Darerah Istimewah Aceh. Tentang usulan peningkatan setatus wilayah kerja pembantu bupati Aceh Tenggara wilayah Gayo Lues menjadi kabupaten



Lues tidak pernah menjabat sebagai bupati. Bisa dilihat dari pemilihan anggota DPRD Pemimpin Tanah Alas mengusahan agar anggota DPRD lebih banyak dari Tanah Alas karena dalam pemilihan bupati berdasarkan suara DPRD yang tidak dapat diganggu gugat sehingga putra Gayo Lues tidak pernah menduduki jabatan bupati. Dalam hal ini masyarakat Gayo Lues merasa adanya tekanan dari, Yang menyebabkan tokoh Gayo Lues ingin membentuk pemerintah sendiri.<sup>9</sup>

Disini masyarakat Gayo Lues merasa adanya tekanan dari pemerintahan Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Dalam dua kali pemerintahan masyarakat Gayo Lues tidak mendapat keadilan. Bukan dalam hal pemerintahan saja tapi juga dalam bidang ekonomi masyarakat Gayo Lues kurang merasakan kesejahteraan. Jika dilihat dari sumber daya alam lebih banyak di daerah Gayo Lues dibandingkan di Aceh Tenggara<sup>10</sup> yang mendorong masyarakat Gayo Lues meminta pembentukan Kabupaten sendiri.

Perjuangan pembentukan kabupaten sendiri terlepas dari kabupaten induk sudah berlangsung lama, sejak bersama tanah Alas memisahkan diri dari kabupaten Aceh Tengah yang kemudian memisahkan diri dari Aceh Tenggara.

---

<sup>9</sup>. *Wawancara*. Samsudin Said. 4 Januari 2012

<sup>10</sup> *Wawancara* Yusuf Maat. 4 April 2012 “akumulasi dari kejadian masa lalu adanya tekanan dari Aceh Tenggara dan Aceh Tengah sehingga masyarakat Gayo Lues ingin memiliki pemerintahan sendiri.

Atas dasar pertimbangan di atas pemerintahan dan berbagai elemen masyarakat mencari solusi agar tidak terjadi konflik terbuka dan akan merugikan masyarakat seperti yang terjadi diberbagai daerah dan sebagai jawabanya adalah pemekaran wilayah dengan harapan mampu menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan dan pelayanan publik masyarakat Gayo Lues. Maka pada tahun 1997 beberapa tokoh Gayo Lues bermusyawarah di Blangkejeren seperti Saleh Adamy, Maat Husin, Syahudintamin dan beberapa tokoh lainnya untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif. Untuk itu dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren, Kabupaten Aceh Tenggara, maksud dan tujuan panitia ini disampaikan kepada Bupati untuk mendukung gagasan ini <sup>11</sup>

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah Kabupaten. Berangkat dari paparan di atas maka penulis tertarik meneliti tentang **Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues 1997-2002.**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan masalah**

Bertolak dari masalah pembentukan kabupaten Gayo Lues tentu menyangkut ruang lingkup yang sangat luas banyak permasalahan seperti

---

<sup>11</sup> Wawancara Yusuf Maat 25 April 2012

aspek politik dan ekonomi. Dalam penulisan ini masalah yang akan diteliti lebih ditekankan pada langkah dalam merealisasikan pembentukan kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan fokus kajian tersebut penulis mengambil batas spatial penelitian kabupaten Gayo Lues. Sedangkan batasan temporalnya mulai dari tahun 1997 sampai 2002. Penelitian ini mengambil tahun 1997 karena tahun 1997, timbulnya gagasan atau keinginan untuk pembentukan kabupaten Gayo Lues. Batasan akhirnya pada tahun 2002 karena pada tahun ini kabupaten Gayo Lues resmi menjadi kabupaten Gayo Lues.

## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di lakukan dalam penelitian sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas yang akan diteliti.

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian-uraian sebelumnya adalah Bagaimana proses pemekaran Aceh Tenggara hingga melahirkan kabupaten Gayo Lues?

## C. Tujuan dan manfaat penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan diatas maka peneliti bertujuan untuk

- a. Mendeskripsikan proses pemekaran Aceh Tenggara hingga melahirkan kabupaten Gayo Lues

- b. Mendeskripsikan perjuangan masyarakat Gayo Lues dalam proses pembentukan Kabupaten Gayo Lues

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk bahan sumbangan terhadap kajian sejarah lokal tentang perkembangan pembangunan kabupaten Gayo Lues
2. Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan menjadikan sebagai referensi untuk penulisan berikutnya.
3. Bahan masukan bagi pemerintahan daerah kabupaten Gayo Lues dalam rangka mengambil kebijakan pembangunan paska pemekaran wilayah

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Studi relevan**

Tulisan mengenai pemerintahan daerah sudah cukup banyak diantaranya yang relevan dengan tulisan ini adalah, yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Bleen Dina Mary Mariana situmpul tentang *Sekitar Pembentukan Kepulauan Mentawai*. mengkaji tentang aspek pembentukan kabupaten kepulauan Mentawai dan keadaan Mentawai setelah menjadi kabupaten. Skripsi Fetri Dewi yang berjudul *Perkembangan Solok Selatan (1969 -2003)* juga mengkaji tentang peruban status pemerintahan menjadi seatu kabupaten baru yang lebih fokus kepada perkembangan fisik dan ekonomi penduduk. dan ada juga skripsi khairum yang berjudul *perubahan administratif kerinci dari bagian provinsi sumatae barat bagian dari provinsi jambi (2006)*. Skripsi Handayani menulis tentang *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangankota*

*Painan*. Yang membahas tentang aspek pemerintahan dan sosial ekonomi. Skripsi Dedid Asrianto *Sejarah Pemekaran Pasaman* yang mengkaji tentang langka-langkah proses yang ditempuh oleh pemerintahan dan segenap elemen masyarakat dalam merealisasikan pemekaran kabupaten Pasaman.UNP. Skripsi Maysarah. 2003. *Faktor –Faktor yang Mendukung Penetapan Belangkejeren Sebagai Ibu Kota Gayo Lues*. Mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadikan Belangkejeren sebagai ibu kota Gayo Lues Unimed. Skripsi. 2001 *Factor –Faktor yang Mendukung Penetapan Stabat Sebagai Ibu Kabupaten Langkat*. Unimed

## **2. Kerangka Konseptual**

Salah satu produk gelombang reformasi yang mengemuka sejak 1997 adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1999, yang kemudian mengalami pergantian dengan UU No. 32 tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Kehadiran UU tersebut merupakan peluang untuk meujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan memiliki kepemimpinan lokal.<sup>12</sup> Gelombang reformasi telah menimbulkan perubahan dan pembaharuan hampir disegala bidang kehidupan. Salah satu tuntutan reformasi adalah tuntutan akan adanya keadilan dibidang politik dan ekonomi bagi masyarakat daerah, yang menimbulkan protes terhadap

---

<sup>12</sup> .Irtanto. 200-,. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 1

keputusan Jakarta yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada daerah untuk mempergunakan sesuai dengan kebutuhan daerah.<sup>13</sup>

Konsep-konsep yang terkait dengan pemerintahan daerah adalah otonomi daerah/dareh otonom, desentralisasi dan tugas pembantuan, pemekaran daerah. Pemerintahan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>14</sup> Otonomi daerah adalah wujud dari upaya pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah masyarakat dapat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini karena pelayanan langsung di laksanakan oleh pemerintahan daerah.<sup>15</sup>

Undang-undang No 32 tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai berikut:

“Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

---

<sup>13</sup> Audrey hahin.2005. *Dari Demberontakan ke Integrasi (Sumatera Barat dan Politik Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Dalam sekripsi Dedi dasrianto

<sup>14</sup> H.A.W.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi: Jakarta PT raja . grapindo*

<sup>15</sup> H. Abdullah Rozalai.2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Feredalisme*. Jakarta PT raja Grapindo Persada. Hal 3

kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Nagara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan menurut G.Kartasaputra otonomi adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintahan daerah terlebih dahulu diperincikan sedemikian rupa oleh pemerintahan pusat.<sup>16</sup> Dalam otonomi daerah dikenal istilah desentralisasi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pementahan pusat kepada daearh otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat kata pembentukan kabupaten. Pembentukan berasal dari kata bentuk (pembentukan) yang berarti membuat sesuatu dengan bentuk (acuan,bangunan) yang tertentu atau supaya tentu bentuknya. Jadi pembentukan merupakan pembuatan (hal, cara dan sebagainya) membentuk dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan adalah suatu cara untuk membuat atau mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses dan prasyarat tertentu. Dalam hal ini pembentukan yang dimaksud adalah pembentukan daerah. Dengan demikian pembentukan daerah juga mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan

---

<sup>16</sup>Zubiir,Zus Neli. *Undang-undang Otonimi Daerah dan Implementasinya Di Sumatra Barat (1945-1974)*

dan kemampuan daerah yang bersangkutan.<sup>17</sup> Sedangkan Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [provinsi](#), yang dipimpin oleh seorang [bupati](#). Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [kota](#). Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.<sup>18</sup> Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administrative daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih.<sup>19</sup>

#### **F. Metode Penelitian .**

Dalam usaha mempersiakan tulisan ini pmenggunakann metode sesuai dengan langkah-langkah sejarah yang meliputi : heuristik, kritik sumber, inetprestasi dan historiografi.<sup>20</sup>(mencari sumber-sumber) menghimpun jejak-jejak masa lampau<sup>21</sup> ,

Pertama *heuristik* merupakan tahap pencarian data dan pengumpulan sumber yang berasal dari zaman itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dari dokomen-dokumen yang sezaman, seperti arsip lampiran surat

---

<sup>17</sup> Belendina Mery Mariana Situmpul. Sekitar Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Skripsi

<sup>18</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>

<sup>19</sup> [journal.ui.ac.id/upload/artikel/03\\_DjokoHarmantyo\\_pemekaran%20daerah.pdf](http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_DjokoHarmantyo_pemekaran%20daerah.pdf)

<sup>20</sup> Louis Gotcalk. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Uversitas Indonesia. Hal 32

<sup>21</sup> Nograho Notosusanto. *197- Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu. hal 36



panitia persiapan peningkatan status wilayah pembantu bupati Balangkeren kabupaten Aceh Tenggara dan artikel, juga dilakukan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam merumuskan pemekaran Aceh Tenggara. Kedua adalah data sekunder adalah data-data yang dapat menunjang penelitian ini yang diperoleh melalui pustaka antara lain: perpustakaan jurusan sejarah, perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang dan perpustakaan daerah Gayo Lues.

Kedua adalah *kritik sumber*, yaitu data-data yang telah terkumpul kemudian diseleksi sehingga data tersebut dapat dipakai dalam penelitian ini. Dalam kritik sumber ini digunakan kritik eksternal yaitu untuk menguji keaslian materinya dan kritik internal yaitu untuk menguji isi informan yang terdapat dalam sumber. Kritik sumber baik internal maupun internal adalah untuk menguji keaslian informasi. Kritik internal yaitu dengan cara melakukan pengujian keaslian dokumen dan arsip-arsip tentang pemekaran Aceh Tenggara.

Ketiga adalah *interpretasi* atau analisis sintesis adalah memilah-milah sejarah untuk menemukan butir-butir informasi yang sesungguhnya, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan, sehingga diperoleh fakta sejarah yang benar

Langkah terakhir adalah *historiografi* merupakan cara penulisan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan.<sup>22</sup> Pada tahap ini data yang ditemukan akan didikrifsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis menjadi karya ilmiah dalam bentuk diskripsi dengan menaratkan keaslian serta bukti yang lengkap dalam uraian yang indah dan artistik. Maka demikian terlihat gambaran dari sebuah pemekaran wilayah dan disini peneliti berusaha menyajikan secara sitematis agar mudah mengerti.

---

<sup>22</sup>*Ibid* hal. 67

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Proses pemekaran Gayo Lues tidak cukup dengan melihat proses sekarang, perlu dilihat kebelakang yakni dengan melihat perjalanan historis daerah kabupaten Gayo Lues dan bagaimana letak wilayah tersebut. Dengan melihat secara diakronik secara perlahan akan terlihat faktor-faktor penyebab pemekaran, proses pemekaran kabupaten Gayo Lues merupakan proses yang panjang, pemikiran untuk membentuk pemerintahan sendiri sudah lama semenjak Tanah Alas dan Gayo Lues/ Aceh Tenggara ingin memisahkan diri dari kabupaten induk yaitu Aceh Tengah pada tahun 1957.

Bila dilihat secara historisnya sebelum tahun 2002 Gayo Lues pertama merupakan wilayah yang berada di administratif Aceh Tengah Gayo Lues ditunjuk sebagai koordinator, setelah Gayo Lues dan Tanah Alas memisahkan diri dari kabupaten induk membentuk kabupaten Aceh Tenggara, pelaksanaan pemerintahan di Gayo Lues ditunjuk seorang pembantu bupati yang berkedudukan di Gayo Lues. Jauhnya jarak antara kabupaten induk dengan Gayo Lues mengakibatkan kurangnya layanan dan pembinaan terhadap masyarakat Gayo Lues menyebabkan banyaknya timbul masalah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat tidak terjangkau oleh pemerintahan daerah.

Gagasan pemekaran Gayo Lues awalnya dimusyawarahkan oleh beberapa orang tua setelah dimusyawarahkan para orang tua tersebut menyetujui pembentukan kabupaten Gayo Lues, setelah adanya persetujuan mereka langsung membentuk sebuah panitia kecil dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren. Langkah selanjutnya panitia Gayo Lues menggambarkan rencana pembentukan kabupaten Gayo Lues keseluruhan kota yang dianggap penting seperti Banda Aceh, Takengon, Medan dan Jakarta. Tapi tidak semua daerah menyambut dengan gembira perubahan Gayo menjadi Kabupaten seperti Banda Aceh dan Medan masih ragu karena tidak yakin Gayo Lues dapat menjadi Kabupaten.

Dalam proses pembentukan kabupaten Gayo Lues para panitia berusaha keras untuk menjadikan Gayo Lues menjadi pemerintahan sendiri, pada akhirnya ide ini disampaikan ke Jakarta, tapi proses di Jakarta begitu banyak mengalami kendala yang pertama negara waktu itu belum stabil yang kedua Gayo Lues perlu dikaji ulang karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi kabupaten

Namun dalam berbagai kendala dan tekanan tersebut, jalan terang mulai terbuka setelah Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk peninjauan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan parpol untuk mohon bantuan. Setelah melalui proses yang agak panjang akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten dalam sidang pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian

pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten Gayo Lues ke DPR-RI. Dalam sidang Paripurna DPR-RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya. Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah Kabupaten.

#### **B. Saran**

1. Pemekaran kabupaten Aceh Tenggara hanya memisahkan kabupaten Aceh Tenggara dengan Gayo Lues yang menyangkut Administrasi pemerintahan, diharapkan pada kedua pemerintahan dan masyarakat kedua wilayah untuk tetap menjalin kerjasama mengenai sosial budaya, dan kerjasama dalam bidang pembangunan dan perekonomian.
2. Pemerintahan Gayo Lues agar mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam Gayo Lues dan masyarakatnya semakin maju baik dalam bidang pembangunan, politik, ekonomi dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip

Surat keputusan bupati daerah tingkat II Aceh Tenggara No : 50 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang pembentukan panitia peningkatan status pembantu bupati wilayah Gayo Lues.

Surat keputusan ketua panitia persiapan peningkatan status pembantu bupati wilayah Gayo Lues Nomor: 08/PPPS-PBGL/AT/II/1998 tentang susunan biro-biro kepanitiaan

Surat bupati Aceh Tenggara No: 135/2972 tanggal 12 Mei 1999 tentang penyampaian proposal pembentukan kab. Gayo Lues

Surat pimpinan DPRD kabupate Aceh Tenggara No: 161/DPRD/1999, tentang persetujuan prinsip DPRD kab. Aceh Tenggara terhadap pembentukan kab. Gayo Lues.

Surat bupati kepala daerah TK II AT No: 135/4312/1999 tentang usul peningkatan status pembantu bupati wilayah Gayo Lues.

Surat ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor: 135/3171/1991 tanggal 09 Agustus 1999 tentang persetujuan dukungan peningkatan status pembantu bupati kabupaten AT, wilayah GL menjadi kabupaten Gayo Lues.

Surat gubernur kepala daerah DIA Nomor: 135/ 19044 tanggal 10 Agustus 1999 tentang usul peningkatan status pembantu bupati wilayah GL

Susulan pertama surat gubernur kepala DAI Nomor: 135/2592 tanggal 19 februari 2000 tentang usul peningkatan status pembantu bupati AT wilayah GL

Susulan surta kedua gubernur DAI Nomor: 135/ 10683 tanggal 22 Juni 2000

Surat freksi PPP DPR R.I Nomor DP. 01/339/FPPP/DPR/X/2000, tanggal 12 Oktober, yang ditujukan kepada menteri dalam negeri ( agar proses pemekaran kabupaten Gayo Lues)

Surat MPR tanggal 09 Oktober 2000 yang di tujukan kepada Mentri Dalam Negeri ( agar memperoses pemekaran kabupaten Gayo Lues)

Katalog BPS. *Gayo Lues dalam Angka 2009*. Kerjasama Badan Pustak Statistik dengan Badan Prencanaan Pemabangunan Kabuapten Gayo Lues

Gayo Lues Dalam Angka 2003. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues

## **B. Buku**

Rozali, Abdullah. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalism*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada

Dian Busrizal. 2005. *Pemekaran daerah dan Implikasinya terhadap Layanan Publik*. Padang: PT Darmayana Jaya dan Wildan Akademika

Hurgronje, snouck. 1996. *Tanah Gayo dan Penduduknya*: Jakarta. INIS

H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja. Grapindo

Louis Gotcalk. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Uversitas Indonesia

Mestika Zed. *Metodelogi sejarah*. Fakultas ilmu – ilmu sosial. Universitas Negeri Padang

H.Gayo.19-3.*Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*.Jakarta: Balai Pustaka

Isman Tantawi 2011. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo lues*. Medan: USU perss

Zubir, zus neli. *Undang – Undang Otonomi Daerah dan Implementasinya di Sumatra Barat (1945-1974)*

Katalog BPS. *Gayo Lues dalam Angka 2009*. Kerjasama Badan Pustak Statistik dengan Badan Prencanaan Pemabangunan Kabuapten Gayo Lues

Aceh Tenggara dalam angaka 1992. Kerjasam BAPPEDA dan kantor Statistik Aceh Tenggara

### C. Skripsi

Fitri Dewi. 2005. *Perkembangan Solok Selatan (1969-2009)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang

Blendina mary mariani. 2002. *Sekitar Pembentukan Kepulauan Mentawai*: Skripsi. Universitas Negeri Padang

Handayani. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangankota Painan*. Skripsi. Universitas Negeri Padang

Dedi Asrianto. 2010 *sejarah pemekaran pasaman*. Skripsi Universitas Negeri Padang

Maysarah. 2003. *Factor –Faktor yang Mendukung Penetapan Belangkejeren Sebagai Ibu Kota Gayo Lues*. Universitas Negeri Medan

Sabar Napitumulu 2001 *Factor –Faktor yang Mendukung Penetapan Stabat Sebagai Ibu kota Kabupaten Langkat*. Universitas Negeri Medan

### D. Artikel Koran

Pemekaran Gayo Lues direstui Mandagrit. Waspada Daerah Istimewah Aceh. Seputar Jalan Rencong. Rabu 20 September 2000

Wakil Ketua DPRD Aceh Tenggara M. Arifin Ismail Masyarakat Aceh Tenggara Mendesak Mandagrit Segera Merealisasikan Gayo Lues menjadi Kupaten. Sinar Pagi. Kamis 2 September 2000. Hal VIII

DPR RI: Gayo Lues Segera Dimekarkan. Waspada Daerah Istimewah Aceh. Seputar Jalan Rencong. Jum'at 20 September 2000

FPPP dan FPG DPR RI Dukung Pembentukan Kabupaten Gayo Lues. Harian Waspada Medan. Sabtu 23 September 2000

PDIP Dan PPP Pemerintahan Realisasikan Kabupaten gayo Lues. Harian Waspada Medan. Sabtu 23 September 2000

[Journal.ui.ac.id/upload/artikel/03\\_DjokoHarmantyo\\_pemekaran%20daerah.pdf](http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_DjokoHarmantyo_pemekaran%20daerah.pdf)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dikutip dari makalah. Riky Argama. 2005. *Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Penomina Pemekaran Wilayah di Indonesia*. Jakarta <http://id.wikipedia.org/wiki/otonomi> daerah